

KINERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PELAKSANAAN PROGRAM OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG

INDA SARI TINUNGKI
ARI J. RORONG
DEYSI L. TAMPONGANGOY

Indasari12011999@gmail.com

ABSTRAC

Summary : Poverty is a problem that cannot be postponed to overcome and must be a top priority in the implementation of social welfare development based on the background of the problem, so this study aims to find out what the performance of the Social Welfare Service on the Implementation of Regional Operations Programs to Resolve Poverty in Bitung City. The type of research used in this research is a qualitative approach. This research aims to understand the needs of the poor. The informants in the study were obtained from field visits to the research location by the researcher, namely in the Social Service Office, the method of determining informants was by selecting sources who really knew about problems that occur on the spot so that they will provide information precisely as needed by researchers. The results showed that the preparation of program plans, strategic plans and operational / implementation plans for the ODSK program by the Social Service of Bitung City. The goal is that the planning of the ODK program and its implementation do not overlap but the program runs one way and in harmony starting from the provincial central level to the District and Village levels.

Keywords: Performance, Social Service, ODSK Program

ABSTRAK

Ringkasan : kemiskinan merupakan masalah yang penanggulangannya tidak dapat di tunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial Pada Pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Di Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif penelitian ini bermaksud untuk memahami kebutuhan masyarakat miskin Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Kantor Dinas Sosial metode penetapan informan dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang terjadi di tempat sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa penyusunan rencana program, rencana strategi dan rencana operasional/pelaksanaan program ODSK oleh Dinas Sosial Kota Bitung. Tujuannya agar dalam penyusunan rencana program ODK ini serta pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih tapi program berjalan searah dan selaras dimulai dari tingkat pusat provinsi sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa.

Kata Kunci : Kinerja, Dinas Sosial, Program ODSK

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang di tandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang sangat mendasar, karena di satu sisi hal ini menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang penanggulangannya tidak dapat di tunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah meluncurkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres pasar, Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan seterusnya. Dapat dicatat juga program-program perberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberian Beras Miskin (Raskin), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah. Penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun hanya sekitar 1 % saja. Menurut data dari BPS yang dihitung setiap bulan Maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa atau 16,58 % dari jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42 % dari jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya.

Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 % dari jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. Lain halnya bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mampu menurunkan angka kemiskinan 1 persen hanya dalam dua tahun. Progres ini tidak lain karena hadirnya program inovasi pengentasan kemiskinan ODSK Hebat. Di mana angka kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 8,85 persen yang pada akhirnya menurun menjadi 7,9 persen pada tahun 2017. Program inovasi ini dilakukan dengan konsep basis data terpadu. Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan itu seperti ketersediaan sarana fisik, sumber daya alam yang menunjang, budaya masyarakat, kemampuan manajerial serta sikap dan perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara bersamaan agar kebijakan yang dibuat Pemerintah dapat ditekan pada akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin meneliti tentang sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota bitung dalam pelaksanaan Program operasi daerah selesaikan kemiskinan. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan nantinya akan memperoleh gambaran mengenai Kinerja Dinas Sosial pada pelaksanaan program ODSK selesaikan kemiskinan di kota bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

KONSEP KINERJA

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Sedangkan dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary (1998; 606), istilah ini menunjukkan “the execution or fulfillment of a duty” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau a person’s achievement under test conditions e13tc. (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb). (Keban, 2004:192).

KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program yang digunakan pemerintah untuk menjamin tingkat minimum tertentu dari pelayanan-pelayanan sosial, uang, dan hak-hak konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses kepada pekerjaan atau kriteria distribusi selain kriteria pasar. Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh satu pihak, tetapi harus secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dibuat pun harus benar-benar terorganisir dengan baik, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan aktivitas ini bisa tercapai dan tidak salah sasaran.

KONSEP PROGRAM ODSK

Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan di Sulawesi Utara mencapai angka 8,98% dari total jumlah penduduk. Penurunan kualitas hidup sejahtera masyarakat juga bisa dilihat dari capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara yang mengalami penurunan dari rangking 2 nasional menjadi urutan 7 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Data tersebut sebenarnya bisa menjadi gambaran dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama ini. Untuk menjawab persoalan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang baru, langsung mengambil aksi strategis penanganan masalah kemiskinan dengan mencanangkan program “Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan” (ODSK).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut H.B Sutopo (2002: 48) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna,

lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang atau perspektifnya.

Fokus Penelitian

1. Efektivitas yaitu dengan mengukur tingkat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target dalam jangka waktu tertentu.
2. Responsiveness atau responsivitas yaitu dengan mengukur daya tanggap atau kemampuan Dinas Sosial kota bitung terhadap harapan, keinginan, kebutuhan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat mengenai pelaksanaan program oeparsi daerah selesaikan kemiskinan itu sendiri agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Accountability atau akuntabilitas menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan kegiatan publik dapat dipertanggung jawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada publik, maupun pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber (tidak melalui media perantara).
2. Data Sekunder, Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Informan Penelitian

Dalam penelitiann kualitatif posisi sumber data manusia (informan/ narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberikan

tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi narasumber lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H.B. Sutopo, 2002:50). Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan kelokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Kantor Dinas Sosial serta Kepala Dinas dan beberapa pegawai dan jugah kepada masyarakat yang menerima bantuan yang dipilih secara purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang kami lakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Wawancara : Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya-jawab secara langsung dengan nara sumber atau responden yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan
- 2) Observasi : merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung dilokasi penelitian mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung
- 3) Dokumentasi : merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2009: 82).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

wawancara dari 10 orang responden atau informan terhadap pertanyaan seputar

Kinerja Dinas Kesejahteraan Soisal Pada Pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Dikota Bitung dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Konsep efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target dalam jangka waktu tertentu. tingkat pencapaian target/ hasil yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bitung pada pelaksanaan program ODSK sudah sangat baik dimana dapa kita lihat hampir semua responden mengatakan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan pada pelaksanaanya dilakukan dengan sangat baik dari pemerintah maupun masyarakat selaku penerima bantuan mengakui itu. Namun disetiap proses tidak mungkin tidak ada kendalanya didalamnya demikian pula proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan. Beberapa responden mengemukakan bahwasanya kendala yang sering ditemukan terkait proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan antara lain perbedaan pendapat sehingga beberapa hal termasuk kerjaan menjadi terganggu. Namun pemerintah terutama kepala dinas sosial mampu menangani kendala ini dengan mengadakan musyawara dan koordinasi terkait hal tersebut. Upaya untuk terus menegur dan mengingatkan sesama rekan kerja dalam pemerintahan jugah menjadi salah satu upaya yang sangat efektif.

2. Responsiveness atau responsivitas

Adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan, dan melaksanakan program-program kegiatan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dimana dapat kita lihat bahwa kepala dinas disini sangat sangat memhami

pekerjaan yang di berikan sehingga dalam penyelesaiannya selalu cepat dan tepat. Hal ini di dukung dengan kemampuannya dalam menentukan agenda kerja dan skala prioritas yang dimana semua mengacu pada aturan dan standar operasional berlandaskan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Memberi ruang masyarakat untuk memberikan masukan atau tuntutan serta menjadi pendengar yang baik juga menjadi nilai tambah yang di lakukan dalam memenuhi kebutuhan.

3. **Accountability atau akuntabilitas**
Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan kegiatan publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada publik, maupun pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam kegiatan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bitung dengan petunjuk teknis yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dari jawaban responden sudah jelas proses pertanggung jawaban disini dilakukan melalui laporan pertanggung jawaban yang di tunjuk kepada kepala dinas sosial, Walikota, gubernur, pemerintah dan yang paling penting adalah kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini berisi dokumen yang terkait penyelenggara pemerintah daerah dan penyelenggara kegiatan dan program kerja daerah dan segala bentuk pelayanan publik beserta pembuktiannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Sosial kota bitung pada pelaksanaan program ODSK sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dalam penelitian ini Kinerja Dinas Sosial Kota Bitung dapat dilihat dari ketiga indikator seperti Efektivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas.

a. Efektivitas

Efektivitas proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan menjadi tolak ukurnya dimana dapat kita lihat bahwasannya proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sudah berjalan dengan baik walaupun ada kendala yang sering di temukan antara lain perbedaan pendapat. Namun pemerintahan terutama kepala dinas sosial mampu menangani kendala ini dengan mengadakan musyawarah dan koordinasi terakrit hal tersebut.

b. Responsiveness (responsivitas)

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan, dan melaksanakan program-program kegiatan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dimana dapat kita lihat bahwa kepala dinas disini sangat sangat memahami pekerjaan yang di berikan sehingga dalam penyelesaiannya selalu cepat dan tepat. Hal ini di dukung dengan kemampuannya dalam menentukan agenda kerja dan skala prioritas yang dimana semua mengacu pada aturan dan standar operasional berlandaskan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Memberi ruang masyarakat untuk memberikan masukan atau tuntutan serta menjadi pendengar yang baik juga menjadi nilai tambah yang di lakukan dalam memenuhi kebutuhan.

c. Accountability (akuntabilitas)

menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan kegiatan publik dapat dipertanggung

jawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada publik, maupun pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam kegiatan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bitung dengan petunjuk teknis yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. proses pertanggung jawaban disini dilakukan melalui laporan pertanggung jawaban yang di tunjuk kepada kepala dinas sosial, Walikota, gubernur, pemerintah dan yang paling penting adalah kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini berisi dokumen yang terkait penyelenggara pemerintah daerah dan penyelenggara kegiatan dan program kerja daerah dan segala bentuk pelayanan publik beserta pembuktiannya.

Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Bitung:

1. seorang pendamping seharusnya dipilih dari petugas yang bekerja di masing-masing kecamatan Selain itu seorang Pendamping perlu untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kerjanya karena pendamping juga mendapatkan gaji. Hal ini bertujuan agar pendamping mampu menjalankan tugasnya dengan baik dari waktu ke waktu.
2. Sumber Daya Manusia merupakan sesuatu yang penting untuk melaksanakan suatu kegiatan karena tanpa adanya Sumber Daya Manusia suatu kegiatan tidak dapat terealisasi dengan baik. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tidak hanya bertugas untuk mengurus masyarakat saja tetapi banyak program- program lain yang harus ditangani. Penambahan SDM bisa

dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan seksi lain yang masih satu bidang yaitu bidang pemberdayaan sosial atau berkoordinasi dengan bidang lain. Dengan Sumber Daya Manusia yang cukup maka sebuah kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul W, S . 2002. *Analisis Kebijakan, Dari formulasi keImplementasi kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksar.
- Ayub M . 2007. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani
- Badudu J.S dan Zain, Sutan M . 1996 *Kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bintarto, R. 2011. *Interaksi desa kota dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia-Indonesia.
- Bugin, B,M,H. 2009. *Penelitian kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chamsyah, B . (2008). *Kesejahteraan (Welfare): Reinveting Pembangunan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat indonesia*. Jakarta : Trisakti University Press
- Dharma, S , 2009. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 1997. *Kamus Tata Ruang*.
- Dun, W.N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Emir S , 2009, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Jakarta: Dinov Progress Indonesia
- Keban, J T. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gva Media.

- Mangkunegara, A.A A P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Redoskarya .
- Nawawi, I . 2009. *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Ndarha, T . (2002). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sinungan, A. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi aksara
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabetha.
- Soetarso, 1977. *Pelayanan sosial dan kebijakan sosial*. STKS, Bandung.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salembah Empat
- Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Administrasi, Fakultas Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Kelompok Usaha Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- B, Muh.S (E 211 10 103) 2015, Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Jurusan ilmu administrasi negara, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
- Kolondam, Helly.F . 2016. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado Jurusan ilmu administrasi negara, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik , universitas sam ratulangi manado.

Sumber lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Profil Kantor Dinas Sosial Kota Bitung 2020
- Oktavia, Arifiana N.I , 2011 Kinerja dinas sosial kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin (P2FM) (Kinerja Dinas Sosial Bersama (KUBE) jurusan Ilmu